

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI
(Kasus di Provinsi Jawa Tengah)
(Capacity Building of Farmer's Institution, Case: Province Central Java)

SAPJA ANANTANYU

Staf Pengajar Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS

ABSTRACT

Agricultural development program is so difficult to reach small farmers. Economic indicators, agricultural infrastructures, and government policy often cause small farmer to economical and social marginalized. Farmer less possession in land, marginal rate of return in agriculture sector, agriculture policy which nonalignment to farmer make more difficult to increase their income. On the other side, farmer's institutions which are expected be able to strengthen the farmer position to face the existing problems not effectively yet.

The purpose of this research is to identify the determinant factors in capacity building of farmer's institution and to formulate an appropriate strategy of extension program. This Research was conducted at three district in Center Java Province, they were: Klaten, Grobogan, and Karanganyar. Data collected through interview of 405 respondents whose member of farmer's institutions, 48 local leaders, and informans. The result shows that member's participation in farmer's institution represent their collective awareness caused easier to manage their farm. The level of member's participation in farmer's institution was influenced by their capacities level, internal and external factors of farmer, e.i: (a) social and economical status of farmer, (b) needs of farmer, (c) learning experience of farmer, (d) local leadership, (e) outsider role, and (f) the quality of extension. Quality of agricultural extension, directly and indirectly, influence to farmer capacities. It increase their participation in farmer's institution and push their institution effectiveness.

Key Word: farmer's institution, farmer' capacity , farmer's participation

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang tidak boleh diabaikan, sebab sektor pertanian masih menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja 90,8 juta orang, 43,8 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 19,2 persen, sektor perindustrian sebesar 13,31 persen, dan sektor jasa sebesar 12,1 persen (Statistik Indonesia, 2001).

Tantangan sektor pertanian, seperti: globalisasi dan liberalisasi ekonomi, semakin menempatkan sektor pertanian di Indonesia pada posisi sulit sehingga memerlukan antisipasi secara tepat. Diperlukan penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini memerlukan *support* dari

berbagai pihak mengingat kebanyakan pelaku usaha pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan melalui pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil.

Kelembagaan petani diakui sangat penting untuk pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Permasalahan dalam penyuluhan pertanian di Indonesia diantaranya adalah masalah kelembagaan tani dan kepemimpinan

petani (Soedijanto, 2004). Kelembagaan petani yang diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Kelembagaan pertanian kurang menempatkan petani sebagai pengambil keputusan dalam usahatani, karena dominansi pengaruh intervensi pihak luar petani terhadap kelompok tani.

Program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani dengan lahan sempit dan buruh tani terdesak ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan. Di sisi lain, kelembagaan petani yang diharapkan mampu menguatkan posisi petani dalam menghadapi permasalahan yang ada belum memperlihatkan keefektifannya.

Terkait dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi anggota dalam kelembagaan petani; dan (2) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota dalam kelembagaan petani.

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu kelembagaan atau institusi pertanian, yaitu: kelembagaan petani. Kelembagaan petani yang dimaksud adalah berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) (Uphoff, 1986). Kelembagaan ini mencakup juga pengertian organisasi petani, artinya, selain 'aturan main' (*role of the game*) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu (Anwar, 2003; Ruttan, 1985; Uphoff, 1986; Yustika, 2006). Kelembagaan petani dalam wujud kongkritnya terdiri atas kelompok-kelompok petani, baik kelompok tani

hamparan, domisili, maupun kelompok tani yang lain.

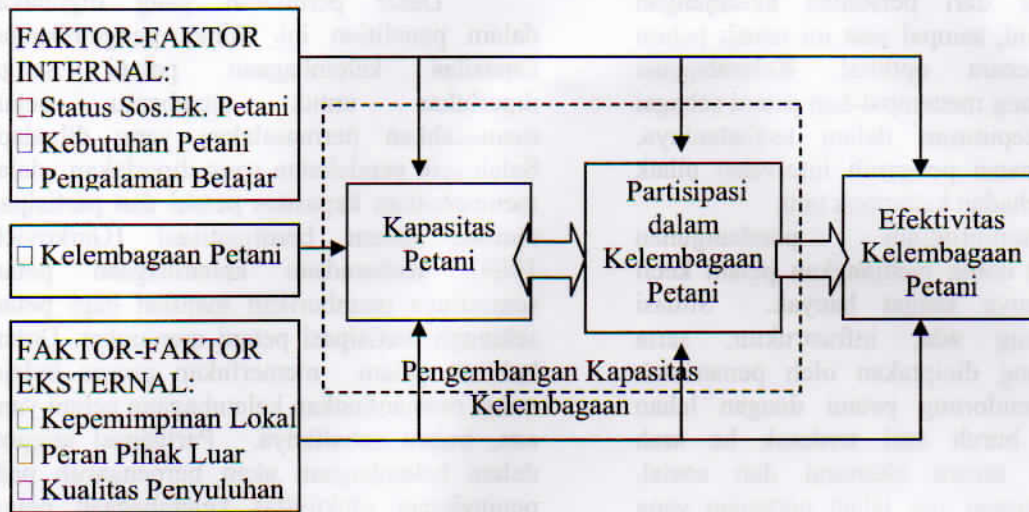
Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan petani sangat diperlukan untuk membantu petani memecahkan permasalahan yang dihadapi. Salah satu pendekatan yang diperlukan adalah meningkatkan kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam berorganisasi (Garkovich, 1989). Keberadaan kelembagaan petani semestinya memberikan manfaat bagi petani sehingga partisipasi petani meningkat. Dalam hal ini, petani memerlukan proses belajar untuk memanfaatkan kelembagaan petani yang ada, bukan sebaliknya. Partisipasi anggota dalam kelembagaan akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas kelembagaan petani dalam mengelola sumberdaya pertanian.

Partisipasi petani adalah derajat keseluruhan peran-serta petani dalam kegiatan kelembagaan dimana petani tersebut menjadi anggota. Partisipasi petani dalam kelembagaan petani dilihat dalam dua aspek, yaitu: (1) Intensitas berdasarkan lingkup kegiatan dalam organisasi, dan (2) Kualitas keterlibatannya. Intensitas dilihat dari frekuensi keterlibatan berdasarkan tipologi aktivitas yang ada dalam organisasi, yang meliputi: (a) Perencanaan dalam kegiatan, (b) Pelaksanaan kegiatan, (c) Pemanfaatan hasil kegiatan, (d) Pemeliharaan kegiatan, dan (e) Pe-ilaian terhadap kegiatan (Ndraha, 1990). Pada aspek ini keterlibatan mempunyai rentang dari pasif sampai dengan mandiri atau dari keterlibatan fisik sampai dengan psikologis (Pretty dalam Pretty dan Vodouhe, 1997; Howard, Baker, & Forest, 1994).

Kualitas partisipasi didasarkan pada parameter: (a) Alasan keikutsertaan, meliputi: kesadaran/kerelaan, tanggung-jawab/peran, fungsi peran yang dilakukan, tingkat pemenuhan kebutuhan, tingkat motivasi kerjasama, dan tingkat potensi yang dimiliki untuk berpartisipasi (Howard, Baker, & Forest, 1994); dan (b) Tingkat manfaat yang diperoleh, seperti: informasi, peningkatan kualitas hasil pertanian, efisiensi pengelolaan sumberdaya pertanian, kemudahan dalam pemecahan masalah yang dihadapi, dan derajat

integrasi antar anggota (Claude & Zamor, 1985; IADB, 2001; Slamet, 2003).

Kerangka pikir dalam penelitian disampaikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Teoritis

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei. Variabel-variabel utama yang terkait dengan pengembangan kelembagaan petani meliputi: (X₁) Status sosial ekonomi, (X₂) Kebutuhan petani, (X₃) Pengalaman belajar, (X₄) Kepemimpinan lokal, (X₅) Peran pihak luar, (X₆) Kualitas penyuluhan, (Y₁) Kapasitas petani, (Y₂) Partisipasi petani dalam kelembagaan, dan (Y₃) Efektivitas Kelembagaan Petani.

Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten Propinsi Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Karanganyar. Ketiga kabupaten tersebut mencerminkan adanya komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Secara keseluruhan penelitian dilakukan pada: 9 kecamatan, 27 desa, dan 70 kelompok tani. Survei dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang ada. Populasi adalah petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *stratified random sampling*. Jumlah responden petani secara keseluruhan sebanyak

405 orang. Data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Selain itu wawancara terstruktur dengan tokoh masyarakat, baik formal maupun non-formal, sebanyak 46 orang, serta wawancara mendalam dengan informan terpilih: kontak tani, pemuka masyarakat, dan dinas terkait. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian telah diuji sebelum digunakan, koefisien reliabilitas berkisar 0,663 – 0,997. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif, secara kuantitatif maupun kualitatif, selanjutnya dilakukan uji statistik korelasi, dan regresi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Gambaran petani yang menjadi responden di tiga kabupaten lokasi penelitian dipaparkan dalam Tabel 1. Petani dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: status rendah (anggota); dan status tinggi, (pengurus kelompok tani).

Tabel 1. Profil Petani Menurut Lokasi dan Status Petani

Profil Petani	Satuan	Lok I		Lok II		Lok III		Nilai Tengah Keseluruhan
		Status Petani		Status Petani		Status Petani		
		Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	
1. Usia	Tahun	50	50	45	45	48,5	49	48,75
2. Tk. Pendidikan								
a. Formal	Tahun	9	12	9	9	6	9	9
b. Non-formal	Skor (3-9)	6 (67)	7 (78)	6 (67)	7 (78)	3 (33)	3 (33)	6 (67)
3. Pengalaman Usahatani	Skor (3-10)	6 (60)	6 (60)	7 (70)	7 (70)	6 (60)	6 (60)	6 (60)
4. Tingkat Pendapatan	Rupiah (000)	800	1000	600	625	1000	1100	900
5. Tingkat Partisipasi Sosial	Skor (3-10)	5 (50)	6 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (60)

Sumber data : Analisis data primer

Keterangan:

- Lokasi I = Kab. Klaten, Lokasi II = Kab. Grobogan, Lokasi III = Kab. Karanganyar;
- Nilai yang disajikan dalam bentuk: median skor dan persen dari skor maks. (dalam kurung);
- Kategori: 25%–43%=rendah sekali, 44%–62%=rendah; 63%–81%=sedang, 82%–100%=tinggi;
- N = 405

Partisipasi Petani Dalam Kelembagaan Petani

Keterlibatan petani dalam berbagai aktivitas pertanian merupakan suatu manifestasi pemenuhan kebutuhan dan sebagai bentuk kesadaran petani sebagai bagian dari

suatu komunitas. Keterlibatan atau partisipasi petani dalam kelembagaan petani merupakan keharusan dalam mendukung eksistensi lembaga petani. Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani dikemukakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor Partisipasi Petani dalam Kelembagaan Petani Menurut Lokasi dan Status Petani

Indikator Partisipasi Petani	Skor	Lok I		Lok II		Lok III		Nilai Tengah Keseluruhan
		Status Petani		Status Petani		Status Petani		
		Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	
1. Intensitas Keterlibatan	(16-64)	42 (66)	50 (78)	39 (61)	49 (77)	47 (73)	54 (84)	48 (75)
2. Kualitas Keterlibatan	(24-96)	71 (74)	74 (77)	68 (71)	74 (77)	73 (74)	74 (77)	73 (76)

Sumber data : Analisis data primer

Keterangan:

- Lokasi I = Kab. Klaten, Lokasi II = Kab. Grobogan, Lokasi III = Kab. Karanganyar;
- Nilai yang disajikan dalam bentuk: median skor dan persen dari skor maks. (dalam kurung);
- Kategori: 25%–43%=rendah sekali, 44%–62%=rendah; 63%–81%=sedang, 82%–100%=tinggi;
- N = 405

Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani berada pada tingkat sedang, yang dilihat indikator intensitas keterlibatan dan indikator intensitas keterlibatan. Keterlibatan petani di berbagai

aktivitas lembaga dalam beberapa aspek seperti: perencanaan, pemeliharaan, dan penilaian hasil, petani belum terlibat se-cara aktif. Di samping itu, keterlibatan petani dalam kelembagaan masih pada tahapan fisik, artinya

ada keterbatasan untuk berperan secara penuh dan secara psikologis masih ada keraguan petani terhadap manfaat yang diperoleh dibanding korbanan yang dikeluarkan.

Perencanaan dalam berbagai kegiatan lembaga menunjukkan keterlibatan anggota masih rendah. Selain adanya budaya paternalistik, seringkali pengurus tidak sabar atau belum memahami arti pentingnya melibatkan anggota. Anggota menjadi syarat legitimasi tanpa ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini sebenarnya terjadi pembelajaran yang berharga sehingga memunculkan kesadaran akan berbagai masalah yang dihadapi oleh petani. Rendahnya partisipasi anggota dalam perencanaan mengakibatkan semakin rendahnya kepedulian terhadap keberadaan lembaga, sehingga memunculkan pemikiran bahwa lembaga selama ini belum cukup menampung aspirasi dan kepentingan mereka.

Kualitas keikutsertaan petani memperlihatkan bahwa pada dasarnya petani menyadari akan pentingnya kerjasama dalam suatu kelompok, merasa bahwa kelompok memberikan manfaat bagi anggota dalam hal: informasi, peningkatan kualitas hasil pertanian, efisiensi pengelolaan, serta kemudahan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Namun kesadaran tersebut ternyata belum cukup, masih banyak anggota yang menyadari keterbatasan peran karena kemampuan yang dimiliki atau tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dukungan keterlibatan petani ini juga terkait

dengan tingkat efektivitas kelembagaan yang ada. Dalam beberapa kelompok tani yang relatif dinamis menunjukkan kualitas keterlibatan yang relatif tinggi juga.

Terdapat kesenjangan antara tingkat partisipasi antara petani status tinggi (ketua dan pengurus kelompok) dengan petani status rendah (anggota kelompok). Secara statistik, kesenjangan intensitas partisipasi antara petani dengan status tinggi (pengurus) dengan petani dengan status rendah (anggota) terjadi di lokasi I (Nilai F sebesar 1,781 $p=0,081$) dan Lokasi III (Nilai F sebesar 2,442, $p=0,018$). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya dominasi ketua dan pengurus dalam kegiatan kelembagaan petani. Ketua dan pengurus melakukan berbagai hal yang menyangkut kelembagaan, sedangkan anggota belum terlibat secara aktif. Kondisi yang demikian dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja, namun akibatnya kurang kondusif bagi perkembangan kelembagaan. Dalam jangka panjang, dukungan anggota semakin lemah karena semakin rendahnya motivasi anggota untuk terlibat.

Secara umum keberadaan lembaga petani dalam bentuk kelompok tani mempunyai arti penting bagi petani. Hal ini terlihat dari berbagai alasan atas keikutsertaannya dalam kelembagaan petani. Alasan keikutsertaan merupakan suatu motif yang mendorong petani terlibat dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang diikutinya. Keragaman alasan keikutsertaan dikemukakan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Macam dan Prosentase Alasan Keikutsertaan Petani Dalam Kelompok Petani Menurut Lokasi

Alasan Keikutsertaan	Lok I (n = 135)		Lok II (n = 135)		Lok III (n = 135)		Keseluruhan (%)
	n	%	n	%	n	%	
1. Peningkatan Hasil	47	35	46	34	51	38	36
2. Kemudahan Usaha	23	17	22	16	22	16	17
3. Wahana Belajar	48	36	41	30	54	40	35
4. Kegiatan Sosial	20	15	9	7	3	2	8
5. Manfaat Lain	6	4	17	13	4	3	7

Sumber data : Analisis data primer

Keterangan:

- Lokasi I = Kab. Klaten, Lokasi II = Kab. Grobogan, Lokasi III = Kab. Karanganyar;

Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan petani terhadap kelembagaan petani. Sebagian besar petani melihat kelembagaan petani sebagai wahana belajar, yaitu: untuk mendapatkan informasi pertanian/menambah wawasan dan pengalaman; dan sarana untuk meningkatkan usaha yang meliputi: peningkatan produksi UT/penerimaan/pendapatan/kesejahteraan.

Pandangan ini menunjukkan harapan (tujuan jangka panjang) petani untuk menjamin kelangsungan hidupnya sebagai petani. Selain itu, terlihat adanya kesadaran petani untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi melalui keberadaan kelembagaan petani. Hanya sebagian kecil dari petani yang mengungkapkan alasan bersifat pragmatis, yaitu untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas yang lain.

Manfaat yang dirasakan petani terkait dengan keberadaan lembaga petani sangat beragam. Manfaat tersebut dapat

dikemukakan antara lain: pertemuan kelompok (pembahasan masalah, pengaturan pola tanam dan irigasi, arisan, simpan-pinjam); penyuluhan (sekolah lapang, demplot); pengadaan dan distribusi/penyaluran sarana produksi pertanian (pupuk, benih, bibit, kredit); melakukan pekerjaan bersama-sama (kerja bakti, pengendalian hama, perbaikan saluran irigasi).

Model Hubungan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi dalam Kelembagaan Petani

Kaitan antara tingkat partisipasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: kapasitas individu, status sosial ekonomi petani, kebutuhan berusahatani, pengalaman belajar, kepemimpinan lokal, peran pihak luar, dan kualitas penyuluhan; diuji dengan analisis lintas (*path analysis*). Hasil uji ini disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Lintas Variabel Bebas Kapasitas Petani Terhadap Variabel Tak Bebas Partisipasi Petani dalam Kelembagaan

Variabel Bebas	Variabel Tak Bebas			
	Kapasitas Individu (Y1)		Partisipasi Petani dalam Kelembagaan (Y2)	
	P_{xY1xi}	P	P_{xY2xi}	P
Status Sosial Ekonomi (X1)	0.215**)	(0,000)	0.074	(0,117)
Kebutuhan Petani (X2)	0.061	(0,105)	0.264**)	(0,000)
Pengalaman Belajar (X3)	0.338**)	(0,000)	-0.061	(0,229)
Kepemimpinan Lokal (X4)	0.310**)	(0,000)	0.073	(0,089)
Peran Pihak Luar (X5)	0.060	(0,118)	0.009	(0,836)
Kualitas Penyuluhan (X6)	0.120**)	(0,003)	0.347**)	(0,000)
Kapasitas Individu (Y1)			0.233**)	(0,000)

Sumber data : Analisis data primer

Keterangan: **) Nyata pada $\alpha = 0.01$

Status sosial ekonomi petani, pengalaman belajar petani, pengaruh kepemimpinan lokal, dan kualitas penyuluhan pertanian berpengaruh positif nyata terhadap kapasitas petani. Tingkat kebutuhan petani dan peran pihak luar mempunyai pengaruh positif namun tidak nyata. Tingkat kebutuhan petani,

pengaruh kepemimpinan lokal, dan kualitas penyuluhan pertanian berpengaruh positif nyata terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Tingkat sosial ekonomi petani, pengalaman belajar petani, dan peran pihak luar pengaruhnya tidak nyata.

Tabel 5. Analisis Lintas Variabel Bebas Kapasitas Petani Terhadap Variabel Tak Bebas Partisipasi Petani dalam Kelembagaan

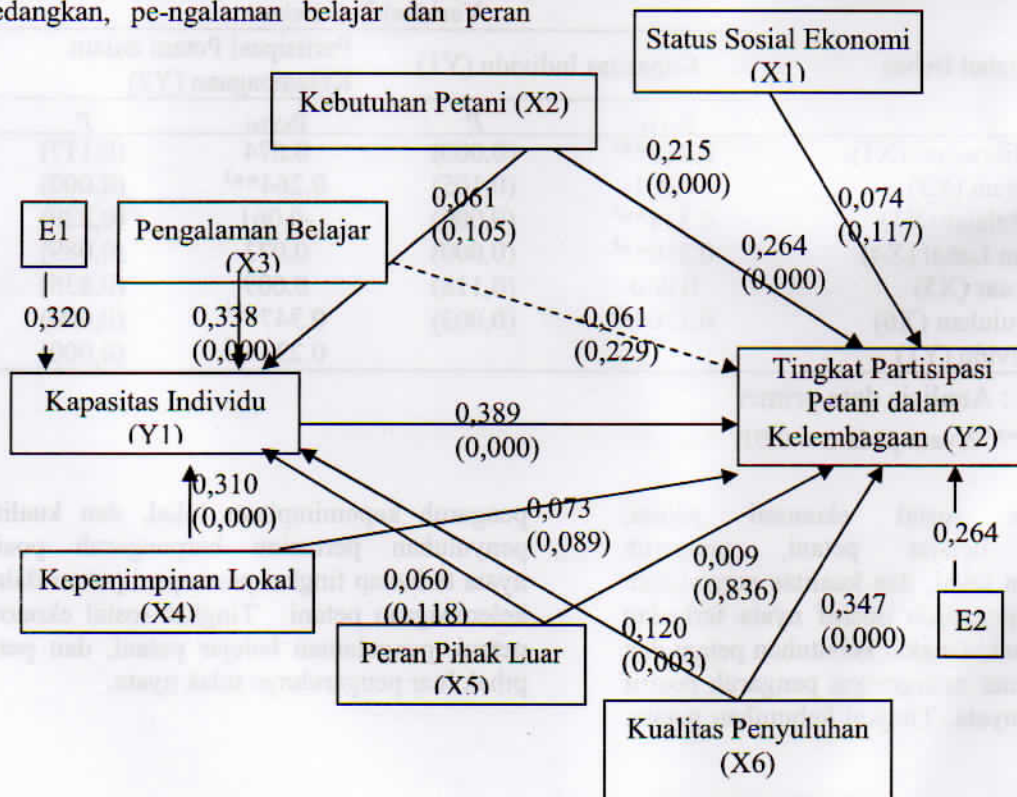
Variabel	Pengaruh					
	Total		Tak Langsung (via Y1)		Langsung	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Status Sosial Ekonomi (X1)	0.124	100	0.050	40	0.074	60
Kebutuhan Petani (X2)	0.278	100	0.014	5	0.264	95
Pengalaman Belajar (X3)	0.079	100	0.079	100	0	0
Kepemimpinan Lokal (X4)	0.145	100	0.072	50	0.073	50
Peran Pihak Luar (X5)	0.014	100	0.014	100	0	0
Kualitas Penyuluhan (X6)	0.375	100	0.028	7	0.347	93
Kapasitas Individu (Y1)	0.233	100			0.233	100

Sumber data : Analisis data primer

Analisis lintas terhadap hubungan kausal variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan menunjukkan: status sosial ekonomi petani, tingkat kebutuhan petani, pengaruh kepemimpinan lokal, dan kualitas penyuluhan pertanian mempunyai pengaruh langsung yang lebih besar terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan. Sedangkan, pengalaman belajar dan peran

pihak luar mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan, yaitu melalui variabel kapasitas petani. Dilihat dari pengaruh totalnya maka kualitas penyuluhan memberikan pengaruh paling besar, sedangkan pengaruh paling kecil adalah peran pihak luar.

Bentuk hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada di bawah:



Gambar 2. Model Hubungan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi dalam Kelembagaan Petani

Hubungan kausal tersebut di atas secara umum dapat dijelaskan sesuai pendapat Howard, Baker, dan Forest (1994) mengenai motivasi seseorang terlibat dalam suatu program tertentu. Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani secara umum ditentukan oleh lingkungan sosial mereka. Lingkungan sosial yang berpengaruh di sini adalah kualitas penyuluhan, kepemimpinan lokal, dan pihak-pihak lain. Kualitas penyuluhan secara signifikan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan. Kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan memberikan andil yang besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga petani. Salah satu tujuan penyuluhan di daerah adalah penguatan kelompok tani. Dari kondisi ini sudah sepatutnya diusahakan peningkatan kualitas penyuluhan di berbagai kawasan perdesaan yang ada.

Keterlibatan seringkali merupakan derajat minat pribadi. Demikian juga partisipasi petani dalam lembaga petani. Dorongan dapat berasal dari dalam diri petani (motif intrinsik) dan dari luar petani (motif ekstrinsik), yang merupakan kebutuhan petani. Dorongan tersebut selain merupakan pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup, juga sebagai wujud rasa tanggung-jawab serta ekspresi dan aktualisasi diri petani dalam lingkungannya. Kebutuhan terhadap prestasi, penghargaan, dan harapan pencapaian tujuan hidup petani. Merupakan kepercayaan (*trust*) dan kerja-sama (*cooperation*) (Krishna, 2000). Dorongan dari luar merupakan tantangan atas kekuatan-kekuatan luar, seperti: usaha untuk meningkatkan nilai tawar atas harga input pertanian, harga produk pertanian; usaha untuk memupuk modal bersama, usaha untuk mempengaruhi kebijakan bila mungkin.

Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani sangat dipengaruhi oleh kapasitas petani. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan pengetahuan, kemampuan, serta kemauan. Untuk menjamin tumbuhnya pengetahuan, kemampuan, dan kemauan diperlukan pendidikan. Kemampuan dan kepercayaan diri biasanya timbul dari: akses pada informasi dan adanya pengalaman belajar. Selain memberikan kesadaran,

penyuluhan pertanian memberikan prasyarat kemampuan serta pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas hidup petani. Untuk itu, menurut Leeuwis (2004), diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyuluhan pertanian, termasuk dalam pengembangan kelembagaan petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani berada pada tingkat sedang, dalam beberapa aspek seperti: perencanaan, pemeliharaan, dan penilaian hasil, petani belum terlibat secara aktif. Terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara petani berstatus tinggi (ketua dan pengurus kelompok) dengan petani berstatus rendah (anggota kelompok).
- (2) Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani dipengaruhi oleh tingkat kapasitas petani, faktor-faktor internal dan eksternal sumberdaya petani, seperti: (a) status sosial ekonomi petani, (b) kebutuhan berusahatani, (c) pengalaman belajar, (d) kepemimpinan lokal, (e) peran pihak luar, (f) kualitas penyuluhan. Status sosial ekonomi petani, tingkat kebutuhan petani, kepemimpinan lokal, dan kualitas penyuluhan pertanian mempunyai pengaruh langsung yang lebih besar, sedangkan pengalaman belajar dan peran pihak luar mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan, yaitu melalui variabel kapasitas petani.
- (3) Kualitas penyuluhan pertanian memberikan pengaruh positif terhadap kapasitas petani dan tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Untuk mencapai hasil optimal maka perlu diupayakan kualitas penyuluhan yang semakin memadai dalam menjawab tantangan pertanian di masa mendatang. Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian mencakup tiga aspek, yaitu:

kompetensi penyuluh, pendekatan, serta kelembagaan yang mendukung.

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan hasil dan pembahasan adalah: (1) Diperlukan peningkatan kualitas penyuluhan pertanian yang lebih mendorong pada peningkatan kapasitas petani, baik kemampuan berusaha-tani maupun kemampuan sosial, dan peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Untuk keperluan itu diperlukan dukungan pemerintah daerah dan pusat; (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dilakukan dengan peningkatan partisipasi anggota. Penyuluhan dilakukan dengan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi. 2003. *Pembangunan Kelembagaan Wilayah Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kerangka Pendekatan Manajemen Ekosistem*. Makalah Kuliah Umum Desember 2003.
- Claude, Jean dan Garcia Zamor. 1985. "An Introduction to Participative Planning and Management" dalam *Public Participation in Development Planning and Management: Cases from Africa and Asia*. Editor Jean Claude dan Garcia Zamor. Westview Press. London.
- Garkovich, Lorraine E. 1989. "Local Organizations and Leadership in Community Development" dalam *Community Development in Perspective*. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 196 – 218.
- Howard, Thelma; Harold R. Baker; dan Laverne B. Forest. 1994. "Constructive Public Involvement" dalam *Extension Handbook: Processes and Practices*. Diedit oleh Donald J. Blackburn. Thompson Educational Publishing, Inc. Toronto. Hal 100 – 114.
- IADB. 2001. *Resource Book On Participation*. Inter-American Development Bank. <http://www.iadb.org/exr/english/POLICIES/participate/index.htm>
- Krishna, Anirudh. 2000. "Creating and Harnessing Social Capital" dalam *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Diedit oleh Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin. The World Bank. Washington.
- Leeuwis, Cees. 2004. *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension*. Third Edition. Blackwell Publishing. Oxford.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pretty, Jules N dan Simplicie D. Vodouhe. 1997. "Using Rapid or Participatory Rural Appraisal" dalam *Improving Agricultural Extension: A reference manual*. Diedit oleh Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, dan Andrew J. Sofranko. FAO. Rome. Hal 69 – 84.
- Ruttan, Vernon W. 1985. "Tiga Kasus Terjadinya Pembaruan Kelembagaan" dalam *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Diedit oleh Faisal Kasryno dan Joseph F. Stepanek. Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia. Jakarta. Hal. 114 – 140.
- Slamet, Margono. 2003. "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan" dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Penyunting Ida Yustina dan A. Sudradjat. IPB Press. Bogor. Hal 7-13.

Soedijanto. 2004. *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis*. Departemen Pertanian. Jakarta.

Uphoff, Norman Thomas. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strate-gi*. Banyumedia Publishing. Malang.